



RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA
JL. RAYA BLORA - CEPU KM. 5

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUANI-1

 1.1 Latar BelakangI-1

 1.2 Landasan HukumI-2

 1.3 Maksud dan Tujuan.....I-4

 1.4 Sistematika Penulisan.....I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN

 LALUII-1

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

 dan Capaian Renstra OPD..... II-1

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... II-9

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

 Fungsi OPD..... II-12

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

 Tahun 2026. I-15

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

 Masyarakat..... II-21

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN..... III.1

 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III-1

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD. III.2

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

 DAERAH..... IV-1

 4.1 Rencana Program dan Kegiatan IV-3

BAB V PENUTUP..... V-1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan proses pelaksanaan program/kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Blora *“Mewujudkan birokrasi yang profesional, prpgresif, bersih dan akuntabel”*.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA

RETNO KUSUMOWATI, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197108251991012001

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPERIDA dan pemangku kepentingan.

Rencana Kerja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2027 disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2027 menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 dan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora’
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun sebelumnya (tahun 2025) serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2027.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Blora ke dalam suatu strategi program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Menyusun kebijakan program/kegiatan dan indikasi kegiatan tahun 2027.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Yang Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Program/Kegiatan Non Urusan dan Program/ Kegiatan Urusan Wajib.

Program/kegiatan urusan wajib dilaksanakan melalui 3 Program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan, dan Program Non Urusan OPD dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025, sebagai berikut :

1) Program Rutin

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 63 orang dan terealisasi 100%.
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, dengan indikator jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 3 dokumen terealisasi 100%.

b) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD, dengan indikator jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi barang milik daerah SKPD dengan target 1 laporan terealisasi 100%.

c) *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :*

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, indikator jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 1 paket terealisasi 100%.
- Penyediaan bahan logistik kantor, dengan indikator jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 5 paket terealisasi 100%.
- Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan, dengan indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 1 paket terealisasi 100%.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan, dengan indikator jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 30 dokumen terealisasi 100%.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 12 laporan terealisasi 100%.

d) *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :*

- Pengadaan mebel, indikator jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 1 paket terealisasi 100%.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bangunan Kantor atau Bangunan lainnya dengan target 1 unit parkir kendaraan terealisasi 100%.

e) *Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :*

- Penyediaan jasa surat menyurat, dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 laporan terealisasi 100%.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 12 laporan terealisasi 100%.

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa dan perlengkapan kantor dengan target 12 laporan terealisasi 100%.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 12 laporan 100% terealisasi 100%.
- f) *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :*
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya dengan target 37 unit terealisasi 100%.

2) Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Program Pendaftaran Penduduk

- a) *Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan :*
- Sosialisasi Pendaftaran Penduduk dengan indikator jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk dengan target 1 laporan terealisasi 100%.

- Program Pencatatan Sipil

- a). *Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*

- Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil dengan indikator jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil dengan target 2 dokumen terealisasi 100%.

- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a) *Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan :*
- Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, dengan indikator jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan target 2 laporan terealisasi 2 laporan.

Adapun rekapitulasi hasil hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 tersebut pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Blora

Kode	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum dan jasa penunjang)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63	0	64	64	100	63	63	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	15	0	3	3	100	3	6	40

3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah									
	Koordinasi dan Penilaian Barang milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	0	0	2	2	100	0	2	0
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	5	0	1	1	100	1	2	40
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20	0	4	4	100	4	8	40
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	0	2	2	100	2	4	40
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	0	12	12	100	12	24	40
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	0	12	12	100	12	24	60
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	0	12	12	100	12	24	40
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	0	12	12	100	12	24	40
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	0	4	4	100	4	8	40

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	0	12	12	100	12	24	40
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraan	37	0	37	37	100	37	37	100
B.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	3,81	0	3	4,06	135,31	3,76	3,76	100
		Persentase kepemilikan KIA	67,21	0	70,50	65,19	92,47	65,03	65,03	100
		Cakupan kepemilikan KK	100	0	100	100	100	100	100	100
		Persentase kepemilikan KTP el	99,38	0	98,30	98,56	100,26	99,34	99,34	100
1.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									
	Sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	6	0	1	1	100	0	1	17
C.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	0	100	100	100	100	100	100
		Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	0	100	100	100	100	100	100
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	0	100	100	100	100	100	100
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	0	100	100	100	100	100	100

		Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	99,90	0	100	99,64	99,64	99,70	99,70	100
		Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-5 tahun	100	0	99.96	99.96	100	99,70	99,70	100
1.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	10	0	2	2	100	0	2	20
D.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	65	0	40	40	100	65	65	100
		Jumlah data ganda kependudukan	40	0				40	40	100
		Jumlah instansi non perangkat daerah yang memanfaatkan profil data kependudukan	2	0	2	2	100	2	2	100
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya pengelolaan informasi kependudukan								
1.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	5	0	1	1	100	1	2	40
E.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100	0	0	0	0	0	100	100
		Jumlah instansi non perangkat daerah yang memanfaatkan profil data kependudukan	2	0	2	2	100	2	2	100
1.	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya profil kependudukan								
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	5	0	0	0	0	0	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora Tahun 2025-2029. Adapun indikator kinerja yang tertuang pada Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1.	Tujuan :							
	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	92.00	92.25	92.50	92.75	93.00	93.25
2.	Sasaran 1 :							
	Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib	Cakupan dokumen administrasi kependudukan	86	87	88	89	90	91
3.	Sasaraan 2 :							
	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data agregat kependudukan	20	25	30	40	45	50
4.	Sasaran 3 :							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, pengendalian internal dan inovasi perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,21	81,75	82,00	82,25	82,50	82,75

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
		Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah	3,0	3,1	3,13	3,16	3,19	3,2
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	90,00	91.30	91,40	91,60	91,90	92,00

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Blora Yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029

No.	Program	Indikator	Target 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian (%)	Target Renstra Perangkat Daerah (%)	Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	3	4.06	135,3	3,81	106,56
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	70,50	65,19	92,47	67,21	96,99
		Cakupan kepemilikan KK	100	100	100	100	100
		Persentase kepemilikan KTP elektronik	98,30	98,56	100,26	99,38	99,17
2.	Program Pencatatan Sipil	Jumlah laporan jasil sosialisasi pendaftaran penduduk	100	100	100	100	100
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100
		Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100
		Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	100	99,64	99,64	99.90	99,74
		Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-5 tahun	99.96	99.96	100	100	99,86
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	40	40	100	65	61,54
		Jumlah data ganda kependudukan	1.740	710	245	40	1.775

No.	Program	Indikator	Target 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian (%)	Target Renstra Perangkat Daerah (%)	Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025 (%)
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	0	0	0	100	0
		Jumlah instansi non perangkat daerah yang memanfaatkan profil data kependudukan	0	0	0	2	0

Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada indikator kinerja yang belum memenuhi target. Kurangnya keberhasilan pencapaian indikator tersebut antara lain :

- 1) Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital tahun 2025 masih sangat rendah. Dari jumlah wajib KTP el sebanyak 719.667 yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital sebanyak 29.242 atau (4,06%). Hal ini disebabkan karena masyarakat kesulitan dalam mengakses aplikasi IKD dikarenakan spesifikasi perangkat seluler yang tidak mendukung.
- 2) Masih ada penduduk yang belum mengurus akta kelahiran anak.
Realisasi cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun pada tahun 2025 sebesar 99,64%. Dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 213.848 yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 213.082 dan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 766 anak.
- 3) Cakupan kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) pada tahun 2025, terealisasi 64,19%, dari jumlah anak usia 0-17 tahun sebanyak 199.134 anak yang memiliki KIA sebanyak 129.824 anak dan yang belum memiliki KIA sebanyak 69.310 anak.
Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan antara lain :
 - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan
 - Kurangnya informasi terkait pelayanan dokumen kependudukan
 - Kurangnya pelayanan jemput bola untuk pelayanan KIA
- 4) Persentase OPD dan Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data kependudukan belum ada capaian atau realisasi masih nol, dikarenakan terkendala sertifikat ISO 27001. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mewajibkan semua lembaga pengguna data kependudukan menerapkan ISO 27001. Penerapan standar ISO 27001 mampu membantu entitas lembaga membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) secara optimal. Kepemilikan ISO 27001 dapat menjadi dasar legitimasi keamanan informasi perusahaan yang dapat digunakan baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan di Kabupaten Blora belum ada OPD yang memiliki sertifikat ISO 27001.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti :Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD antara lain belum tersebarnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan terbitnya dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cakupan kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2025 ada yang belum tercapai.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat mempengaruhi tujuan pertama yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi jangka menengah pembangunan Kabupaten Blora.

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Blora, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Cakupan Data Base Kependudukan

Data Kependudukan, merupakan kumpulan data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data penduduk, memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam menentukan berbagai

kebijakan pembangunan, baik pembangunan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.

Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersimpan di dalam data base kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Hal tersebut diamanatkan di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena data penduduk memiliki arti yang sangat strategis, setiap penduduk Kabupaten Blora harus tercatat dalam Data Base Kependudukan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas data penduduk, setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diharapkan dapat dilaporkan dan dicatat pada setiap tingkatan pemerintahan dan selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan.

Melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setiap hari, data base kependudukan akan terjaga akurasinya.

2. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pemerintah terus melanjutkan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi dengan meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini dirancang sebagai pengganti kartu identitas fisik seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan dan swasta secara lebih aman dan efisien.

Identitas Kependudukan Digital merupakan sistem digitalisasi data kependudukan yang diakses melalui aplikasi khusus di perangkat seluler.

Pengguna tidak lagi perlu membawa KTP fisik, karena semua informasi yang sebelumnya tercantum dalam KTP telah diintegrasikan secara digital. Dengan sistem ini, masyarakat bisa menunjukkan identitas mereka kapan pun dan dimana pun hanya dengan perangkat seluler.

Pengembangan Identitas Kependudukan Digital merupakan langkah awal penting dalam mendukung program "Indonesia Go Digital 2025". Dengan sistem ini pemerintah berharap bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat, sekaligus mengurangi potensi pemalsuan identitas.

3. Penerapan KTP Elektronik

Pada tahun 2027 penerapan KTP elektronik akan tetap menjadi kegiatan prioritas sehingga masyarakat memahami akan manfaat dan fungsinya serta secara sadar datang ke tempat pelayanan untuk mendaftarkan diri dan mendapat pelayanan KTP elektronik. Pelayanan KTP elektronik memasuki tahap reguler, dan akan lebih diarahkan kepada penduduk wajib KTP pemula yang baru berusia 17 tahun atau telah menikah.

Manfaat KTP elektronik adalah :

- a. Sebagai identitas jati diri, berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal dalam pengurusan berbagai kepentingan.
- b. Mencegah terjadinya pemalsuan dan KTP ganda.
- c. Dapat dipergunakan sebagai ID card dalam pembuatan ATM, asuransi dan lain-lain.
- d. Terciptanya akurasi data penduduk untuk mendukung program pembangunan lain.

4. Pencatatan Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan proses penting dalam membangun data base kependudukan yang akurat dan penerbitan aktakelahiran memberikan kepastian hukum akan status seseorang di dalam keluarga.

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Blora dalam memiliki akta kelahiran sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan sampai dengan akhir tahun 2025, kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun terealisasi 99,64%. Dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 213.848 yang memiliki akta kelahiran sebanyak 213.082 anak. Diharapkan pada tahun 2027 semua anak memiliki akta kelahiran.

Beranjak dari permasalahan tersebut dan mengacu kepada Rencana Strategis Pencatatan Sipil Nasional, bahwa **"Semua anak Indonesia (usia 0-18 tahun) tercatat kelahirannya"**, terutama anak usia 0-5 tahun, kegiatan pencatatan kelahiran menjadi prioritas yang akan ditunjang dengan berbagai pelayanan.

Pelayanan penerbitan akta kelahiran terutama bagi bayi usia 0-60 hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengoptimalkan program Selintas dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Puskesmas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2027, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD.

Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada rancangan awal Rencana kerja 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mengacu pada rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang tertuang pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.526.354.080,- (delapan milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah).

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2027
Kabupaten Blora

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum dan jasa penunjang)	100%	8.294.312.234	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinduk capil		100%	8.294.312.234	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.600.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.600.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	6.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinduk capil	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	4	6.600.000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dinduk capil	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4	4.00.0000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dinduk capil	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4	4.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinduk capil	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	3.000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinduk capil	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	3.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.709.250.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.729.250.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinduk capil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	64	5.676.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinduk capil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	64	5.676.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	4.000.000	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4.500.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				982.162.234	Administrasi Umum Perangkat Daerah				982.162.234	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinduk capil	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	9.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinduk cail	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	9.000.000	
	Penyediaan Peralatan danperlengkapan kantor	Dinduk capil	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	65.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Dinduk capil	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	65.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinduk capil	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinduk capil	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	6.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinduk capil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	650.162.234	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinduk capil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6	650.162.234	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinduk capil	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	13.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinduk capil	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	13.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	9.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinduk capil	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	9.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	225.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinduk capil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	225.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinduk capil	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinduk capil	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	5.000.000	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				474.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				474.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinduk capil	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	200.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinduk capil	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	200.000.000	
	Pengadaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	54.000.000	Pengadaan Mebel	Dinduk capil	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	54.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	50.000.000	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	80.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	80.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	40.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	0	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				840.8000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				840.800.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	5.000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	490.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	490.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinduk capil	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinduk capil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12	295.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinduk capil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12	295.800.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinduk capil	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinduk capil	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinduk capil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	36	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinduk capil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	36	80.000.000	
	Pemeliharaan mebel	Dinduk capil	Jumlah mebel yang dipelihara	20	15.000.000	Pemeliharaan mebel	Dinduk capil	Jumlah mebel yang dipelihara	20	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Dinduk capil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	140.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Dinduk capil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	140.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1	25.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinduk capil	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1	25.000.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinduk capil	Cakupan kepemilikan KK		65.612.453	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinduk capil	Cakupan kepemilikan KK	98,9%	65.612.453	
			Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)					Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	100%		
			Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)					Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	70,6%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.			Persentase kepemilikan KTP elektronik					Persentase kepemilikan KTP elektronik			
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				10.612.453	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				10.612.453	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah dokumen hasil pencatataan, penatausaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	143.900	5.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah dokumen hasil pencatataan, penatausaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	143.900	5.000.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Pendu	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1	5.612.453	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1	5.612.453	
3.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				55.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				55.000.000	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan sosialisasi pendaftraan penduduk	1	55.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Jumlah laporan sosialisasi pendaftraan penduduk	1	55.000.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinduk capil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	18.165.370	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinduk capil	Prosentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun	100	18.165.370	
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100				Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100				Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100		
			Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100				Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100		
			Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	100				Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	100		
			Persentase akta kelahiran anak usia 0-5 tahun	100				Persentase akta kelahiran anak usia 0-5 tahun	100		
1.	Pelayanan Pencatatan Sipil				1.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil				1.000.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dindik capil	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	18.545	500.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dindik capil	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	18.545	500.000	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dindik capil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	1	500.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dindik capil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	1	500.000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				17.165.370	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				17.165.370	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1	500.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1	500.000	
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1	500.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1	500.0000	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	1	55.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinduk capil	Laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	1	55.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah data ganda kependudukan		126.638.582	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah data ganda kependudukan		126.638.582	
			Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan					Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan			
			Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama					Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama			
1.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1	106.638.582	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1	106.638.582	
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dinduk capil	Jumlah dokumen data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1	10.000.000	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dinduk capil	Jumlah dokumen data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1	10.000.000	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1	10.000.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	Dinduk capil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1	10.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinduk capil	Cakupan pengelolaan Profil Kependudukan	100	21.625.441	Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinduk capil	Cakupan pengelolaan Profil Kependudukan	100	21.625.441	
			Jumlah Instansi non perangkat daerah yang memanfaatkan profil data kependudukan	2				Jumlah Instansi non perangkat daerah yang memanfaatkan profil data kependudukan	2		
1.	Penyusunan Profil Kependudukan				21.625.441					21.625.441	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain	Dinduk capil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1	21.625.441	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Lain	Dinduk capil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1	21.625.441	

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Blora.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2027

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1.5 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2027 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan antara lain yaitu :

1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP elektronik.
4. Penerapan Identitas Kependudukan Digital
5. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya".

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun 2012 dengan langkah-langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi Pemerintah meluncurkan Identitas Kependudukan Digital. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti pelayanan kesehatan, perbankan dan layanan administrasi lainnya secara praktis tanpa harus membawa KTP fisik.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi Keempat Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif”.

a. Berintegritas.

Tata kelola pemerintahan yang berintegritas menempatkan pentingnya moralitas dan etika dalam tindakan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Berintegritas juga bermakna pemerintahan yang bersih. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih berarti menciptakan sistem yang bebas dari korupsi, nepotisme, dan praktik-praktik buruk lainnya.

Ini melibatkan penerapan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah diambil secara adil dan berdasarkan pada kepentingan masyarakat.

b. Adaptif.

Misi ini mengakui perlunya pemerintah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Adaptif mengandung unsur responsif, yaitu mampu memberikan pelayanan berkualitas unggul sesuai kebutuhan jaman dan harapan masyarakat secara inklusif.

Perkembangan masyarakat yang semakin cerdas di era disrupsi teknologi informasi menuntut pelayanan publik yang cepat tanggap di mana saja kapan saja. Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk merespons secara cepat terhadap tantangan dan peluang baru, serta memodifikasi kebijakan dan strategi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Adaptif juga bermakna tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya untuk memastikan bahwa pelayanan dan program mencapai dampak yang diinginkan.

c. Kolaboratif.

Pemerintah Kabupaten Blora memerlukan kolaborasi dengan semua pelaku Pembangunan, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan harmonisasi program Pembangunan.

d. Berkesinambungan.

Pemerintah yang adaptif dan kolaboratif mengembangkan kreativitas penggalan pendapatan daerah secara inovatif diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang kuat untuk kesinambungan pembiayaan pembangunan. Pemerintah yang berintegritas dan adaptif diperlukan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi prioritas nasional dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Misi ini memfokuskan pada transformasi tata kelola pemerintahan menuju standar yang lebih tinggi dalam hal kebersihan, efektivitas, adaptabilitas, dan daya saing.

Misi ini mendukung visi "*Sesarengan mBangun Blora, Maju dan Berkelanjutan*" dengan memastikan pemerintah bekerja jujur, transparan, dan responsif terhadap perubahan. Pemerintahan yang bersih meningkatkan kepercayaan masyarakat, sementara kebijakan yang adaptif memungkinkan layanan publik lebih cepat dan efisien. Kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat membantu mempercepat pembangunan dan memastikan manfaatnya merata.

Misi ini penting karena tanpa tata kelola yang baik, pembangunan bisa terhambat oleh korupsi, kebijakan yang tidak relevan, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak.

Dengan pemerintahan yang kuat, fleksibel, dan bekerja sama, Blora dapat berkembang lebih maju dan berkelanjutan.

Dari Misi IV tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora menyelaraskan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu "Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien" dengan indikator tujuan "Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan".

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu dengan program prioritas yang dilaksanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
2. Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
3. Meningkatnya cakupan kepemilikan KK
4. Meningkatnya kepemilikan KTP elektronik
5. Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun
6. Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-5 tahun
7. Menurunnya jumlah data ganda kependudukan
8. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga pengguna melalui Perjanjian Kerjasama
9. Meningkatnya cakupan pengelolaan profil kependudukan
10. Meningkatnya jumlah instansi non pemerintah yang memanfaatkan profil kependudukan

1.6 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas data base kependudukan
- 2) Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan

2. Sasaran Renja Perangkat Daerah

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengolahan data berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang transparan dan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur.
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, memiliki integritas dan profesional.

- 4) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan
- 5) Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 yaitu :

“Sesarengan Mbangun Blora Maju dan Berkelanjutan”

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi keempat Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif ”**, dengan tujuan “Meningkatnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien” dengan indikator tujuan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

Dalam upaya mewujudkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora maka dirumuskan sasaran strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah yaitu :

- 1) Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib

Indikator sasaran : Cakupan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

- 2) Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar

Indikator sasaran : Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data agregat kependudukan.

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu dengan program prioritas yang dilaksanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

2. Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
3. Meningkatnya cakupan kepemilikan KK
4. Meningkatnya kepemilikan KTP elektronik
5. Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun
6. Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran 0-5 tahun
7. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga pengguna melalui Perjanjian Kerjasama
8. Menurunnya jumlah data ganda kependudukan
9. Meningkatnya cakupan pengelolaan Profil Kependudukan
10. Meningkatnya jumlah instansi non pemerintah yang memanfaatkan profil kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dihadapkan pada beberapa permasalahan/kendala, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian tugas. Ada beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pencapaian indikator terutama untuk cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Kartu Identitas Anak (KIA) dimana cakupan kepemilikannya masih rendah dikarenakan masyarakat belum melakukan registrasi IKD dan update data anak usia lebih 5 tahun untuk perubahan KIA baru dan pelayanan jemput bola difokuskan pada pelayanan perekaman KTP Elektronik ke desa-desa dan perekaman penduduk rentan (lansia, disabilitas, ODGJ).

Peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Dilaksanakannya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai di kecamatan dan desa
2. Berbagai regulasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
3. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan database Kependudukan

Program dan kegiatan pada tahun 2027, dikelompokkan ke dalam Program/Kegiatan Rutin SKPD dan Program/Kegiatan Urusan Wajib.

4.1.Rencana Program dan Kegiatan :

Rancangan Awal Rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2027 mengacu pada program/kegiatan/subkegiatan yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan subkegiatan yaitu :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan subkegiatan terdiri dari :
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- . Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan mebel
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pendaftaran Penduduk

- 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan :
 - a. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

C. Program Pencatatan Sipil

- 1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
 - b. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan subkegiatan terdiri dari :
 - a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Usulan pagu anggaran rencana program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada rancangan awal Renja tahun 2027 mengacu pada pagu anggaran yang tertuang di Renstra Tahun 2025-2029 yaitu sebesar Rp. 8.526.354.080,- (delapan milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Adapun rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada rancangan awal Renja Tahun 2027 sebagai berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2027 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				65.612.453	APBD			67.102.479
		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Dukcapil	3,77				3,78	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Dukcapil	65,58				65,87	
		Cakupan kepemilikan KK	Dukcapil	100				100	
		Persentase kepemilikan KTP el	Dukcapil	99,35				99,36	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Dukcapil		10.612.453	APBD			12.102.479
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Dukcapil		55.000.000	APBD			55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				18.165.370	APBD			18.577.897
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Dukcapil	100				100	
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Dukcapil	100				100	
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Dukcapil	100				100	
		Persentase Akta Perceraian Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Dukcapil	100				100	
		Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	Dukcapil	99,7				99,73	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		Dukcapil		1.000.000	APBD			1.000.000
2.12.03.2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Dukcapil		17.165.370	APBD			17.577.897

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				126.638.582	APBD			129.514.481
		Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Dukcapil	50				55	
		Jumlah data ganda kependudukan	Dukcapil	1.060				720	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan		Dukcapil						
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				21.625.441	APBD			22.116.544
		Cakupan pengelolaan Profil Kependudukan	Dukcapil	100				100	
		Jumlah instansi non perangkat daerah yang memanfaatkan Profil Data Kependudukan	Dukcapil	2				2	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Data Profil Kependudukan yang disusun	Dukcapil	100	21.625.441	APBD		100	322.116.544

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.257.377.090	APBD			11.013.920.000
		Persentase kinerja pelaksanaan subkegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	Dukcapil	100				100	
2.12.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dukcapil	100	13.600.000	APBD		100	15.000.0000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Dukcapil	100	5.709.250.000	APBD		100	5.696.000.000
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang teradministrasi dengan baik	Dukcapil	100	4.500.000	APBD		100	4.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum pada perangkat daerah	Dukcapil	100	982.162.234	APBD		100	903.685.251
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang mlilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan	Dukcapil	100	474.000.000	APBD		100	115.000.000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Dukcapil	100	840.800.000	APBD		100	839.150.000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Dukcapil	100	270.000.000	APBD		100	205.000.000

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BLORA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.526.354.080,00							8.048.396.652,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.526.354.080,00								8.048.396.652,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.526.354.080,00								8.048.396.652,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum dan jasa penunjang)	-			100 %	8.294.312.234,00						-	7.811.085.251,00	
		[Meningkatkan kinerja penunjang urusan pemerintahan]	Persentase kinerja pelaksanaan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah (perencanaan, penganggaran, evaluasi, keuangan, BMD, kepegawaian, umum, dan jasa penunjang)	100	100	100	100	8.294.312.234,00	-	-	-	-	-	-	7.811.085.251,00	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			4 dokumen	13.600.000,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-	-	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah				6 Laporan	3.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.709.250.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	5.729.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	5.676.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		5.696.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	29.250.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		29.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	4.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4.500.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	4.500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	982.162.234,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	903.685.251,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	650.162.234,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		593.065.251,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	13.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Blora, Jepón, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-		9.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	225.000.000,00	Kab. Blora, Jepón, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-		195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Blora, Jepón, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	474.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	54.000.000,00	Kab. Blora, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Jepón, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	80.000.000,00	Kab. Blora, Jepón, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Blora, Jepón, Jepang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	840.800.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	839.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		4.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	490.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-		490.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	295.800.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-		295.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	270.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	205.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	80.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	15.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	140.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-		88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	65.612.453,00						-	67.102.479,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk]	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	100 3.81 67.21 99.38	100 3.20 63.74 99.31	100 3.75 64.59 99.32	100 3.76 66.34 99.34	65.612.463,00	-	-	-	-	-	-	67.102.479,00	-
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	10.612.453,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	12.102.479,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0002		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				143900 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	5.612.453,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		6.102.479,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	55.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	18.165.370,00						-	18.577.897,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	Cakupan Akta Kelahiran Anak Usia 0-5 Tahun Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	100 99.9	100 99.55 99.96	100 99.65 99.96	100 99.7 99.70	18.165.370,00	-	-	-	-	-	-	18.577.897,00	-
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	1.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				18.545 Dokumen	500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	17.165.370,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	17.577.897,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil				1 Laporan	500.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				2 Laporan	16.165.370,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		16.577.897,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	126.638.582,00						-	129.514.481,00	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	Jumlah Data Ganda Kependudukan Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12.2 40 65	0 2080	0 1740 40	1400 2.44 45	126.638.582,00	-	-	-	-	-	-	129.514.481,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	126.638.582,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-	-	129.514.481,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasiliitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	106.638.582,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		107.514.481,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo matif	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	21.625.441,00						-	22.116.544,00	
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Jumlah Instansi Non Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan Persentase data profil kependudukan yang disusun	100 2	0 100	1 100	100 2	21.625.441,00	-	-	-	-	-	-	22.116.544,00	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	21.625.441,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif	-	-	22.116.544,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun				1 Dokumen	21.625.441,00	Kab. Blora, Jepon, Jepon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P erbanguna n Daerah Peningkata n kinerja tata kelola pemerintah an yang ber integritas dan transfo rmatif	-		22.116.544,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							8.526.354.080,00							8.048.396.652,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2027 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RKPD Kabupaten Blora Tahun 2027 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2045, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2027 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2027 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2027 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2045, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2027 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

